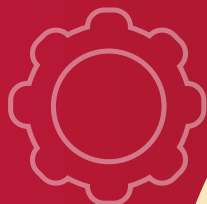




United Cities and
Local Governments
Asia-Pacific



PANDUAN

PEMERINTAH DAERAH
UNTUK **SDGs**
PENERAPAN

SDGs DAN TUJUAN GLOBAL



17
Tujuan

169
Target

Ratusan
indikator
spesifik



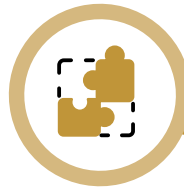
*Worldbank

*ESCAP berdasarkan data dari Alliance Development Works dan UNU-EHS, 2014.

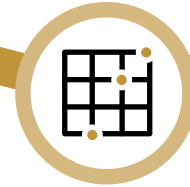
ROADMAP UNTUK PENERAPAN SDGs

APA ITU ROADMAP?

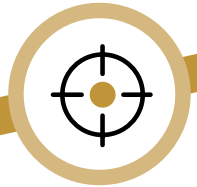
Roadmap untuk melokalisasi SDGs merupakan alat pemerintah daerah untuk berpartisipasi dan memperkuat perannya dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Meskipun SDGs merupakan agenda pembangunan global, peran pemerintah daerah dalam mengadakan pembangunan pada tingkat daerah adalah salah satu modal terpenting dari implementasi SDGs. Setelah dibuatnya sebuah *roadmap*, pemerintah daerah dapat mengimplementasikan SDGs secara konsisten sesuai dengan konteks yang ada terlepas dari perubahan pendanaan atau sumber daya manusia yang seringkali terjadi dalam keseharian pemerintahan daerah.



Mempersiapkan komitmen politik untuk mencapai SDGs



Melakukan studi dasar dan pemetaan aktor untuk menyesuaikan persoalan SDGs dengan fungsi kelembagaan yang ada dimiliki



Mendirikan unit khusus SDGs untuk membantu koordinasi

UNTUK SIAPAKAH ROADMAP INI?

Pengguna utama dari *roadmap* ini adalah pemerintah daerah, lembaga perencanaan daerah dan perangkat organisasi daerah lainnya karena *roadmap* ini adalah alat bantu yang baik untuk perencanaan dan evaluasi. Akan tetapi, pada akhirnya keterlibatan seluruh sektor dibutuhkan dalam implementasi seluruh 17 tujuan SDGs yang memerlukan pemahaman mengenai kekuatan, tantangan dan peluang pemerintah daerah. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat berperan dalam memimpin pengembangan *roadmap* tersebut.



HAL-HAL PENTING

- Meski komitmen untuk mencapai SDGs baru disahkan pada tahun 2015, pemerintah daerah telah lama berupaya untuk meningkatkan pelayanan publik seperti yang dimuat sebagai target-target SDGs.
- SDGs tidak bisa sebagai tujuan yang berdiri sendiri. SDGs harus diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- *Roadmap* ini merupakan kerangka umum bagi pemerintah daerah untuk melokalisasi SDGs. *Roadmap* ini tidak mencerminkan proses persiapan implementasi.

PENILAIAN CEPAT KEBUTUHAN TERKAIT SDGs DIANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN ASOSIASI PEMERINTAH DAERAH*

* Berdasarkan survei terhadap negara-negara anggota wilayah Selatan dan Barat Daya

- ▶ bagi **50% pemerintah daerah, SDGs** bukan sebuah istilah baru. 85% responden memiliki pengetahuan dasar mengenai SDGs dan hubungannya dengan peran pemerintah daerah.
- ▶ Hanya **40%** pemerintah daerah memiliki **bidang yang berurusan dengan SDGs**
- ▶ SDGs akan memiliki dampak baik terhadap praktik perencanaan, penyusunan kebijakan serta peranan baru dalam penyediaan pelayanan publik



PENILAIAN KOMUNIKASI

- ▶ **33%** dari pemerintah daerah memilih untuk **menerima kumpulan praktik terbaik** atau referensi tindakan nyata yang mudah dilakukan dari SDGs.
- ▶ **Pemimpin daerah merupakan aktor kunci di pemerintah daerah**, menjadikannya target utama untuk program pengkomunikasian SDGs.
- ▶ **Pemahaman mengenai pentingnya peran pemerintah daerah terhadap SDGs** merupakan indikator utama dari program pengkomunikasian SDGs.



PENILAIAN PEMBELAJARAN

- ▶ Berbagi dan bertukar pengalaman mengenai tindakan nyata yang mudah diterapkan dalam penerapan dan pencapaian SDGs merupakan hal yang paling dicari oleh pemerintah daerah.
- ▶ Pentingnya peran pemerintah daerah dengan SDGs merupakan topik utama dalam agenda pembelajaran.
- ▶ Pengalaman lapangan dalam implementasi SDGs melalui kunjungan peer learning, lokakarya, dan pengembangan rencana kerja merupakan metode pembelajaran yang lebih disukai responden.
- ▶ Dari 12 target pada tujuan SDGs No. #8, kebijakan yang berorientasi pada pembangunan saat ini menjadi topik yang banyak diimplementasikan oleh responden.

LINGKUNGAN YANG MENDUKUNG SDGs UNTUK MEMPERKUAT DESENTRALISASI

- **65% dari SDGs** berada dalam lingkup kota dan kabupaten, memberikan peranan penting bagi pemerintah daerah
- Akan tetapi, **efektivitas pemerintah daerah** bergantung pada kebijakan, kerangka hukum dan kerangka kelembagaan nasional serta otonomi yang diberikan
- **Penilaian komparatif terhadap lingkungan yang mendukung desentralisasi telah dilakukan oleh UCLG ASPAC, Cities Alliance dan UNDP** untuk menyajikan analisis kondisi yang memperlihatkan memperlihatkan kendala dan kemajuan, serta menguraikan langkah-langkah untuk meningkatkan implementasi

12 kriteria yang dinilai:



Kerangka konstitusional



Kerangka legislatif



Demokrasi daerah



Dana perimbangan dari pemerintah pusat



Pendapatan asli daerah



Pengembangan kapasitas administrasi pemerintah daerah



Transparansi



Partisipasi masyarakat



Kinerja pemerintah daerah



Strategi daerah



Partisipasi wanita di pemerintah daerah

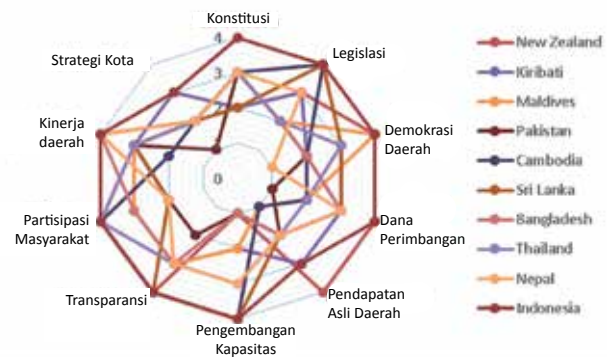


Manajemen lingkungan hidup oleh pemerintah

- **Penilaian cepat terhadap 10 negara telah dilakukan untuk menghasilkan nilai awal tiap kriteria**

Kebanyakan negara Asia Pasifik memiliki performa baik dalam Transparansi, Partisipasi Masyarakat dan Kinerja Daerah (Kriteria 7, 8, 9)

- Kriteria terkait Konstitusi, Legislasi, Demokrasi Daerah dan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat ditemukan berada pada tingkat rata-rata (Kriteria 1, 2, 3, 4)
- Seluruh sampel negara yang dianalisis secara umum kurang baik dalam hal Strategi Daerah
- Di sisi lain, pengembangan kapasitas pemerintah dan pendapatan asli daerah masih lemah di beberapa negara



PENERAPAN SDGs DI BOJONEGORO

1. Kabupaten Bojonegoro sudah kesiapan untuk mengimplementasi SDGs.
2. Membentuk kantor wilayah untuk Sekretariat SDGs di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.
3. Mengadakan diskusi-diskusi intensif dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bersangkutan dan organisasi internasional lainnya.
4. Mengesahkan Peraturan Bupati mengenai unit khusus untuk SDGs.
5. Meninjau dan menyelaraskan informasi dasar sesuai dengan perspektif SDGs (menggunakan informasi dasar dari MDGs)
6. Menyiapkan SDGs prioritas yang sejalan dengan rencana daerah
7. Mengadakan pemantauan berkala dan koordinasi antara perangkat kerja daerah, sektor swasta dan masyarakat tiap minggunya
8. Mensinkronisasikan dengan kebijakan daerah lainnya

Saya siap untuk SDGs

